

STRUKTUR, FUNGSI, PENDEKATAN DAN KAPABILITAS SISTEM POLITIK

Tujuan Instruksional

- a. Menjelaskan P.Strukt & Fungsi
- b. Menyebutkan Struktur SPI
- c. Menguraikan Fungsi Struktur
- d. Menyebutkan Jenis pendekatan
- d. Menyebutkan Macam-macam Kapabilitas SPI

Pokok Bahasan

Struktur, fungsi, pendekatan dan kapabilitas

I. Bahan Bacaan

- a. Kantaprawira Rusadi, 2004, Dr, Sistem Politik Indonesia, suatu model pengantar, Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- b. Sukarna, Drs, 1992, Sistem Politik Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung
- c. Mas'oed Mohtar dan Andrew Mac Colin, 2000, Perbandingan Sistem Politik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- d. Eston David, 1988, Alih bahasa Simamora Sahat, Drs, Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- e. Budiardjo Miriam, Prof, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

II. Pertanyaan Kunci

- a. Menjelaskan P.Strukt & Fungsi
- b. Menyebutkan Struktur SPI
- c. Menguraikan Fungsi Struktur
- d. Menyebutkan Jenis pendekatan
- d. Menyebutkan Macam-macam Kapabilitas SPI

III. Tugas

A. Struktur dan Fungsi

1. Pengertian dan Definisi

Struktur Politik berasal dari dua kata yaitu, Struktur dan Politik. Struktur berarti badan atau organisasi, sedangkan politik berarti urusan Negara. Jadi Secara harafiah struktur politik adalah badan atau organisasi yang berkenaan dengan urusan Negara.

Untuk itu struktur politik selalu berkenaan dengan alokasi nilai –nilai yang bersifat otoritatif, yaitu yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan.

Sebagaimana Bertrand Russell mengatakan bahwa kekuasaan adalah konsep yang mendasar dalam ilmu social, seperti halnya energi dalam konsep ilmu alam.

Menurut Muhtar Afandi, Kekuasaan adalah Kapasitas, kapabilitas, atau kemampuan untuk mempengaruhi, meyakinkan, mengendalikan, menguasai dan memerintah orang lain (kks = k3m5).

Dari pendapat tersebut diatas, terlihat bahwa kekuasaan merupakan focus inti dari politik. Sedangkan politik sendiri memiliki focus utama adalah keputusan (Morton R. Davis). Keputusan yang dimaksud adalah keputusan yang menyangkut kepentingan keseluruhan masyarakat dan bersifat dapat dipaksakan berlakunya.

2. Struktur Politik

Struktur adalah pelebagaan hubungan organisasi antara komponen-komponen yang membentuk bangunan itu. Struktur politik sebagai satu species struktur pada umumnya, selalu berkenaan dengan alokasi-alokasi nilai yang bersifat otoritatif yaitu yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan. Kekuasaan merupakan substansi pokok pembahasan ilmu politik ia merupakan hal pokok seperti energi dalam konsep ilmu alam (Bertrand Russell). Kekuasaan adalah sebuah kapasitas, kapabilitas atau kemampuan untuk mempengaruhi, meyakinkan, mengendalikan, menguasai dan memerintah orang lain. Kapasitas demikian erat hubungannya dengan wewenang (authority) hak (right), dan kekuatan (force, naked power).

Karl W Deutsch memberikan makna terhadap hakikat politik : Politik berkenaan dengan pencapaian tujuan masyarakat, bidang tugasnya ialah keputusan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat dan bersifat mengikat dan dapat dipaksakan berlakunya. Politik adalah suatu proses dalam mana masyarakat memutuskan bahwa aktivitas tertentu adalah lebih baik dari yang lain dan harus dilaksanakan.

Struktur politik dapat diklasifikasikan menjadi bangunan yang nampak secara jelas (kongkrit) dan juga tidak jelas.

a. Mesin Politik : Informal (Infrastruktur Politik)

Mesin politik informal (Infrastruktur Politik) adalah mesin politik yang ada dalam masyarakat yang tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik negara, seperti, perubahan UUD, pembuatan UU, pembuatan keputusan politik lainnya , yang berlaku umum dan memaksa bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Faktor yang bersifat informal (tidak atau kurang resmi) yang dalam kenyataan mempengaruhi cara kerja aparat masyarakat untuk mengemukakan, menyalurkan, menerjemahkan, mengkonversikan tuntutan, dukungan yang berhubungan dengan kepentingan umum. Kelompok ini termasuk golongan penekan, withinput, alat komunikasi massa dan lain-lain. Struktur semacam ini dapat berupa tatanan atau pranata yang tak tampak secara jelas tetapi berpengaruh, dan eksistensinya dapat dirasakan karena adanya fungsi-fungsi yang mengalir sehingga pendekatan yang digunakan kemudian disebut *structural functional*.

Yang termasuk dalam tidak resmi atau kurang resmi :

- 1) Pengelompokan masyarakat atas dasar persamaan sosial ekonomi, walaupun tidak nampak sebagai asosiasi tetapi juga memiliki kekuatan, minimal memberikan dasar sikap mental (*mental attitude*) kelompok tertentu sehingga memiliki *forces of revolution*. Pengelompokan tersebut terdiri atas golongan tani, golongan pekerja/buruh, golongan professional, kelas menengah, golongan intelegensia.
- 2) Pengelompokan atas dasar perbedaan cara, gaya disatu pihak dan pengelompokan atas dasar kesadaran akan adanya persamaan jenis-jenis tujuan. Karena seringkali bersifat terorganisir dan mempunyai struktur sehingga membentuk assasional politik (*political associational groups*). Yang termasuk dalam kategori ini adalah golongan anggota organisasi sosial non politik, golongan agama/spiritual, golongan seniman, golongan media massa dan lain-lain.
- 3) Pengelompokan masyarakat atas dasar kenyataan dalam kehidupan politik rakyat yang satu sama lain mengemban fungsi dan peranan politik tertentu, yang secara konvensional dikenal dalam setiap system politik. Kategori ini antara lain : partai politik, golongan kepentingan, golongan penekan, tokoh politik dan media komunikasi politik.

b. Mesin Politik Resmi (Suprastruktur Politik)

Mesin politik resmi (Suprastruktur Politik) adalah mesin politik yang ada dalam Negara yang memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik negara, seperti, perubahan UUD, pembuatan UU, pembuatan keputusan politik lainnya , yang berlaku umum dan memaksa bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Lembaga yang dapat disebut sebagai mesin politik formal atau resmi, yang

dengan absah mengidentifikasi berbagai masalah, menentukan dan menjalankan segala keputusan yang mengikat seluruh anggota masyarakat untuk mencapai kepentingan umum.

Mesin politik formal (Suprastruktur) dapat dikategorikan :

- 1) Meminjam teori Montesqui (Emanuel Kant : Trias Politica) kekuasaan pemerintah dipisah sehingga terbagi menjadi : kekuasaan atau lembaga legislatif (pembuat undang-undang) eksekutif (pelaksana undang-undang) dan yudisial/yudikatif (pelaksana peradilan). Menurut teori ini tujuan semula adalah sparation of power guna mencegah keabsolutan penguasa. Karena itu kekuasaan harus dipisah. Tetapi dalam perkembangannya berubah menjadi pembagian kekuasaan (distribution of power). Selanjutnya “teori catur praja” Vollenhoven membagi kekuasaan menjadi : pemerintahan, kepolisian, peradilan, dan perundang-undangan.
- 2) Dilihat dari perspektif teori dikotomi, hanya ada dua kekuasaan yaitu : kekuasaan menetapkan kebijakan (politcy making) dan kekuasaan melaksanakan kebijakan (policy executing).
- 3) Dilain pihak Almond melihat bahwa suprastruktur politik mempunyai fungsi sehingga kekuasaan lalu dibagi menjadi rule making, rule application, rule adjudication.

Dalam membahas struktur politik pemerintah, biasanya sistem pemerintahan juga dibahas. Sistem pemerintahan adalah cara kerja dan sekaligus hubungan fungsi antara lembaga-lembaga negara yang biasanya ditetapkan juga oleh konstitusi pula.

Klasifikasi kekuasaan dibagi menjadi dua ; Pertama sistem pemerintahan parlementer (parleamentary executive, cabinet government system). Kedua sistem pemerintahan presidential (non parliamentary executive, fixed executive, presidential system, chief executif system).

Struktur politik tidak dapat dilepaskan dari fungsi politik yaitu input, withinput, thruhput, output, conversation, feedback.

c. Fungsi Suprastruktur dan Infrastruktur Politik

1). Fungsi Supratruktur Politik :

Fungsi Struktur lembaga ini menurut Gabriel A. Almond adalah meliputi :

- Rule Making (membuat Undang-undang)
Fungsi ini dilaksanakan oleh lembaga perwakilan rakyat (Badan Legislatif) yang meliputi, DPR, DPRD I, dan DPRD II dan DPD sebagai lembaga yang mewakili aspirasi daerah). DPD ini merupakan badan baru yang dibentuk setelah orde reformasi yang fungsinya berkaitan dengan kepentingan daerah, seperti, pembuatan RUU tentang Otonomi Daerah, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pemekaran daerah tingkat propinsi maupun kabupaten /kota.
- Rule application (melaksanakan Undang-undang)

Fungsi yang kedua ini adalah fungsi pelaksanaan terhadap peraturan perundangan yang telah dibuat oleh badan legislatif sebagaimana yang termaktub dalam Rule Making. Badan ini adalah merupakan badan Eksekutif yang meliputi dari pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah.

- Rule adjudication (mengadili pelaksanaan Undang-undang)
Badan yang memiliki fungsi yang ketiga ini adalah badan peradilan yang meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial serta badan kehakiman yang ada sampai ke daerah, seperti, PN, PT dan PTUN.

2). Fungsi Infrastruktur Politik

- Pendidikan Politik
Fungsi ini adalah fungsi untuk peningkatan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam system politiknya.
Menurut paham politik totaliter, rakyat dididik, direkrut, untuk dijuruskan ke arah mobilisasi (David E. Apter)
Media pendidikan politik meliputi antara lain , Surat Kabar, Radio , TV dan PT.
- Artikulasi Kepentingan
Adalah lembaga yang berfungsi menyampaikan aspirasi rakyat . Lembaga ini adalah meliputi antara lain, LSM, Ormas, OKP.
- Agregasi Kepentingan
Adalah lembaga yang berfungsi memadukan aspirasi rakyat yang disampaikan oleh lembaga seperti, LSM, Ormas, OKP . Lembaga yang memiliki fungsi adalah lembaga partai politik.
- Rekrutmen Politik
Adalah lembaga yang berfungsi melakukan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin bagi masyarakat.
Menurut Herman Finer, sifat ideal seorang pemimpin adalah :
 - a. Kesadaran
 - b. Kebulatan Pandangan
 - c. Ketetapan Jiwa
 - d. Keyakinan
 - e. Kekreatifan
 - f. Kepekaan hati nurani
 - g. Keberanian
 - h. Kemampuan memukau
 - i. Kepandaian
- Komunikasi Politik
Adalah kegiatan yang berguna untuk menghubungkan pikiran politik